

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam proses pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh Negara-negara berkembang diarahkan untuk mencapai suatu kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Namun dalam pencapaiannya sering dihadapkan pada masalah-masalah pokok seperti pengangguran, kemiskinan dan ketidakseimbangan ekonomi antar daerah (lestariningsih, 2006). Namun upaya untuk mengentaskan pengangguran masih belum berhasil karena dihadapkan pada kenyataan kesempatan kerja yang diciptakan kurang mampu menyerap seluruh angkatan kerja yang ada.

Masalah yang menjadi penyebab terjadinya pengangguran adalah bertambahnya penduduk yang semakin banyak membawa dampak pada peningkatan jumlah angkatan kerja. Peningkatan jumlah angkatan kerja secara drastis tidak seimbang dengan lapangan pekerjaan yang tidak memadai akan menimbulkan jumlah pengangguran yang lebih besar. Masalah tersebut merupakan masalah utama bagi pemerintah pusat maupun daerah yang belum ditemukan jalan keluarnya hingga saat ini. Pemerintah sendiri telah melakukan upaya-upaya untuk mengatasi penurunan jumlah pengangguran dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja dengan cara memudahkan para pengusaha untuk mengeksport atau membuka pasar lebih luas, tetapi pemerintah juga harus melakukan perlindungan tenaga kerja dengan memberikan gaji atau upah layak yang harus diterima oleh para pekerja setelah melakukan proses produksi.

Masalah yang sering muncul di daerah adalah masalah kurangnya ketersediaan lapangan pekerjaan yang dapat menyerap tenaga kerja. Masalah ini disebabkan oleh berbagai faktor salah satunya adalah kepadatan penduduk akibat dari urbanisasi karena perpindahan penduduk dari desa ke kota yang ingin mencari pekerjaan di kota serta perkembangan kota yang terus meningkat menyebabkan jumlah tenaga kerja yang terus bertambah, sementara disisi lain penciptaan kesempatan kerja relatif terbatas. Hal ini mengakibatkan pengangguran yang semakin bertambah.

Usaha-usaha pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan selain pertumbuhan ekonomi juga upaya bagaimana untuk menurunkan jumlah pengangguran, karena jika tidak demikian maka jumlah pengangguran akan terus meningkat dan mengganggu proses pembangunan daerah selanjutnya. Pembangunan di bidang ketenagakerjaan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional sehingga masalah ketenagakerjaan yang muncul juga merupakan dampak dari masalah pembangunan ekonomi nasional.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama yaitu untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah (Arsyad,2010).

Masalah ketenagakerjaan akan muncul apabila jumlah tenaga kerja yang ditawarkan lebih besar dari lapangan kerja yang ada di setiap sektor usaha. Dengan kata lain lapangan kerja yang ada tidak mampu menampung (mempekerjakan) tenaga kerja yang ada terlebih tenaga kerja tidak terlatih dan tidak terdidik. Masalah ini akan menyebabkan semakin meningkatnya tingkat pengangguran dan angka kemiskinan. Hal ini akan berdampak pada proses pembangunan perekonomian. Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi secara absolute menyebabkan jumlah penduduk yang meningkat dan berakibat jumlah tenaga kerja yang bertambah. Pertumbuhan penduduk usia kerja yang lebih cepat dalam pasar tenaga kerja harus diimbangi dengan perluasan penyerapan tenaga kerja. Adanya ketidakseimbangan antara pertumbuhan angkatan kerja dan penciptaan tenaga kerja akan menyebabkan tingginya pengangguran. Tingginya angka pengangguran dan kurangnya ketersediaan lapangan kerja yang mengakibatkan berkurangnya daya tampung bagi banyaknya jumlah para pencari kerja serta pemborosan dalam sumber daya dan potensi yang ada, meningkatnya beban masyarakat sebagai sumber utama kemiskinan dan mendorong keserakahan masyarakat yang berpengaruh dalam jangka panjang akan mengakibatkan terlambatnya pertumbuhan ekonomi (Djojohadikusumo. 1994:3).

Pertumbuhan ekonomi di Kota Kupang bisa dipacu oleh besarnya angkatan kerja. Laju pertumbuhan angkatan kerja di Kota Kupang lebih besar dibanding dengan penyerapan tenaga kerja. Persentase angkatan kerja tahun 2017 sebesar 59,00% dan tahun 2021 naik menjadi 62,34% (Badan Pusat Statistik Kota Kupang). Pertumbuhan angkatan kerja ini bila tidak diikuti oleh

pertumbuhan lapangan kerja akan mengakibatkan bertambahnya pengangguran.

Tabel 1.1
Penyerapan Tenaga Kerja di Berbagai Sektor
di Kota Kupang Tahun 2017-2020 (dalam persen)

No	Lapangan kerja utama	Tahun (%)			
		2017	2018	2019	2020
1	Pertanian	2,80	3,73	4,79	5,63
2	Pertambangan & penggalian	0,48	N/A	1,59	2,48
3	Industry	3,42	5,53	5,91	6,91
4	Listrik & gas	1,71	6,22	1,59	2,48
5	Konstruksi	5,77	2,29	8,38	7,57
6	Perdagangan	34,10	30,91	29,53	27,69
7	Transportasi & komunikasi	10,36	9,42	20,50	20,74
8	Keuangan	6,72	6,72	12,05	7,46
9	Jasa-jasa	34,64	35,18	17,25	18,42

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Kupang, 2022

Berdasarkan tabel diatas sektor yang menyerap tenaga kerja paling tinggi adalah sektor perdagangan dengan penyerapan 27,69% diikuti sektor transportasi dan komunikasi sebesar 20,74% kemudian sektor jasa sebesar 18,42%, sektor konstruksi sebesar 7,57% dan sektor yang paling rendah menyerap tenaga kerja adalah sektor pertambangan & penggalian, listrik dan gas yaitu sebesar 2,48%. Jadi, hal ini menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja di Kota Kupang masih didominasi oleh sektor perdagangan dan jasa-jasa. Tinggi rendahnya jumlah tenaga kerja yang diminta oleh perusahaan di pengaruhi oleh tingkat tinggi rendahnya barang yang diproduksi tergantung pada tinggi rendahnya permintaan konsumen. Semakin tinggi jumlah barang yang diminta oleh konsumen semakin tinggi pula jumlah tenaga kerja yang diminta oleh perusahaan tersebut (Simanjuntak, 2001).

Salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan adalah dengan memperbaiki sistem pengupahan melalui kebijakan upah

minimum. Penerapan kebijakan upah minimum merupakan upaya dalam meningkatkan upah perkapita pekerja sehingga dapat meningkatkan tingkat upah rata-rata pekerja.

Menurut Iksan, dkk(2020) upah merupakan imbalan dari hasil kerja yang dilakukan seseorang kepada perusahaan. Meningkatnya upah ditandai dengan adanya kenaikan jumlah permintaan barang dan jasa. Oleh karena itu naiknya permintaan barang dan jasa dapat menyebabkan jumlah produksi meningkat, yang pada akhirnya menyebabkan peningkatan jumlah tenaga kerja yang diperlukan oleh perusahaan. Kenaikan upah dapat meningkatkan kesempatan kerja, karena dengan naiknya tingkat upah yang dilakukan diharapkan juga akan ada peningkatan kesempatan kerja melalui peningkatan konsumsi.

Selain pengupahan pemerintah juga perlu memperhatikan beberapa hal yakni upaya untuk menyelesaikan masalah ketenagakerjaan yaitu PDRB dan investasi. Menurut Ali, dkk (2020) faktor PDRB merupakan nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh beberapa unit produksi atau sektor disuatu daerah dalam jangka waktu tertentu. PDRB dapat mempengaruhi jumlah angkatan kerja yang bekerja dengan asumsi apabila nilai PDRB meningkat, maka jumlah nilai tambah output atau penjualan dalam seluruh unit ekonomi disuatu wilayah akan meningkat. Semakin besar output atau penjualan yang dilakukan perusahaan maka akan mendorong perusahaan untuk dapat menambah permintaan tenaga kerja agar produksinya dapat ditingkatkan untuk mengejar peningkatan penjualan yang terjadi.

Menurut Ali, dkk (2020) faktor investasi secara langsung dapat meningkatkan kapasitas produksi. Dengan peningkatan kapasitas produksi akan meningkatkan permintaan faktor produksi, termasuk tenaga kerja. Pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh investasi yang terealisasi baik dalam rangka PMDN maupun PMA. Diharapkan dengan meningkatnya investasi dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi. Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat memperluas lapangan kerja di sektor ekonomi sehingga angka pengangguran dapat turun dan kemiskinan dapat dikurangi.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti perlu untuk mengadakan penelitian dengan judul “ANALISIS PENYERAPAN TENAGA KERJA DI KOTA KUPANG”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota Kupang?
2. Bagaimana pengaruh PDRB terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota Kupang?
3. Bagaimana pengaruh Investasi terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota Kupang?
4. Bagaimana pengaruh Upah Minimum, PDRB dan Investasi terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota Kupang

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui besar pengaruh upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota Kupang.
2. Untuk mengetahui besar pengaruh PDRB terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota Kupang
3. Untuk mengetahui besar pengaruh investasi terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota Kupang
4. Untuk mengetahui besar pengaruh Upah Minimum, PDRB dan investasi terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota Kupang

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Penulis
Untuk menambah ilmu dan wawasan tentang tenaga kerja di Kota Kupang
2. Bagi Instansi Pemerintah
Hasil penelitian diharapkan menjadi masukan yang berguna dan menjadi pertimbangan yang bermanfaat bagi pemerintah
3. Pihak Lain/Peneliti Lainnya
Sebagai bahan referensi dan informasi bagi yang tertarik melakukan penelitian